

DAFTAR PUSTAKA

Literatur pustaka seperti buku :

Bambang Waluyo.1991, *sistem pembuktian dalam peradilan indonesia*. Jakarta :

Sinar grafika.

Harwati tuti, 2015, *peradilan indonesia, sanabil puri bunga amanah : mataram*

Hasim purba. 2019, *dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Jakarta timur: Sinar

Grafika.

Ismail rumadan “*pelaksanaan dan hambatan eksekusi sengketa arbitrase*

nasional oleh pengadilan negeri” laporan penelitian, 2016: hlm. 16-21.

Kitab acara hukum perdata (KUHperdata)

Moh sandi “*tinjauan yuridis mengenai peranan arbitrase dalam penyelesaian*

sengketa dagang” karya ilmiah, hlm.3-6.

Mosgan situmorang “*kedudukan klausul arbitrase pada kasus kepailitan” e-book*

jakarta : 2021, hlm 8.

Rachmadi Usaman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia*

Puska Utama, Jakarta.

Sjahdeini sutan remi. 2016, *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan*. Jakarta:

Prenamedia group.

Subekti. 2003, *pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT.intermasa

Suratman dan philips dillah. 2012, *metode penelitian hukum* Malang: alfabeta.

Zainal asikin. 2022, *Hukum kepailitan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Jurnal – jurnal

Fitria annisa “ *penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu upaya debitur mencegah kepailitan*”, *lex journalica*, volume 15 tahun 2018.

Hadi naufal 2022, *penegakan hukum di indonesia di tinjau dari perspektif sosiologi hukum*, jurnal hukum dan pembangunan ekonomi, nomor 2, volume 10

Haslinda silmi dkk, “*hubungan antara hutang dan kinerja perusahaan manufaktur di indonesia yang go public tahun 2016 – 2018*”, *jurnal muara ekonomi dan bisnis nomor 1*, volume 4.

Hermanto Bagus, 2023, *quo vadis pengadilan khusus di indonesia dalam putusan mahkamah konstitusi*, *jurnal penelitian hukum de jure*, volume 23.

Izaak N. khristofel, “*arbitrase sebagai mekanisme pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis*”, *lex privatum*, volume III, nomor 1.2015.

Izaak, khristofel N “*arbitrase sebagai mekanisme pilihan hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis*” *Lex privatum*, vol 3, nomor 4 oktober 2015.

Kapero Harry, “*akibat harta kepailitan terhadap harta peninggalan dikaitkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*”, *lex et societatis*, volume VI 2018.

Priscilla Chintya Claudia Karouw, 2020, *kajian yuridis pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan, lex privatum volume.VIII*

Supeno Dkk, “*kedudukan asas hukum melalui penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999*”, *wajah hukum*, 3 (1), 51-59.

Sujitno, 2002, *konflik yurisdiksi antara arbitrase dan pengadilan niaga*, *jurnal hukum nomor 19*, volume 9.

Tata Wijayanta “*asas kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan pengadilan niaga*” *journal dinamika hukum* vol.25 nomor 2 tahun 2014

Zikri Irawan, “*aspek masalah kepailitan dalam tataran teori dan problematikanya di Indonesia*”, *jurnal iqtishaduna*.

Undang-undang & Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1998 tentang kepailitan

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan
kehakiman

Wignyusumarto Parwoto, 2001, *himpunan kajian putusan mahkamah agung
RI dan pengadilan niaga mengenai perkara permohonan pernyataan pailit*